



Warga Bongsuwung Minta Waktu Lagi

■ Mengadu ke DPRD DIY Soal Rencana Penertiban Bangunan oleh PT KAI

YOGYA, TRIBUN - Ratusan warga Bongsuwung, Jlagran, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta, kembali mendatangi gedung DPRD DIY di Malioboro untuk audiensi dengan anggota dewan, Rabu (4/9) siang. Mereka meminta anggota parlemen menjadi mediator saat berdialog dengan perwakilan PT KAI perihal rencana penertiban bangunan rumah warga di kawasan Bongsuwung.

Kedatangan warga Bongsuwung ke DPRD DIY hari ini merupakan kali kedua, setelah sebelumnya berlangsung pada Kamis (29/8) lalu. Mediasi yang dilakukan di ruang rapat DPRD DIY ini diikuti perwakilan warga, KAI Daop 6 Yogyakarta, dan Ketua sementara DPRD DIY, Nuryadi. Beberapa warga Bongsuwung lainnya menunggu di halaman untuk menantikan hasil audiensi.

Koordinator warga, Chang Wendryanto, mengatakan, alasan para warga meminta pengunduran rencana penertiban ini lantaran kawasan Bongsuwung bukan hanya menjadi tempat tinggal, namun juga lahan mencari rezeki. "Karena, mereka belum bisa mencari nafkah selain di tempat itu. Kerjanya di situ dan itu lahan kerja mereka," ujar Chang kepada awak media.

Ia menjelaskan, membahas Bongsuwung jangan bicara soal kejelekannya, tetapi juga keuntungannya dari KAI yakni salah satunya kebersihan dan keamanan. "Dulu di sana copetnya banyak, dengan adanya mere-

UPAYA MEDIASI

- Ratusan warga Bongsuwung, Jlagran, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta, kembali mendatangi gedung DPRD DIY di Malioboro, Rabu (4/9) siang.
- Mereka meminta anggota parlemen menjadi mediator saat berdialog dengan perwakilan PT KAI perihal rencana penertiban bangunan rumah warga di kawasan Bongsuwung.
- Warga meminta pengunduran rencana penertiban ini lantaran mereka belum bisa mencari nafkah selain di kawasan itu.

ka (warga) kan (copet) juga mikir," imbuhnya.

Ketua sementara DPRD DIY, Nuryadi, yang ditunjuk sebagai mediator mengatakan mediasi kali ini belum menghasilkan keputusan. Pasaunya, keputusan pasti terkait eksekusi penertiban itu akan dilakukan oleh KAI pusat. Ia menambahkan, sebelum ditetapkan hasil mediasi dan rapat keputusan bersama KAI pusat, tidak ada tindakan penertiban oleh PT KAI di kawasan Bongsuwung.

"Tidak selesai hari ini. Karena yang berhak menjawab KAI Jakarta. Kapan waktunya kita belum tahu. Kita mencari rapat berikutnya. Kuncinya di KAI Jakarta, Jakarta menjawab seperti

apa kami belum tahu," jelas Nuryadi, politisi PDIP itu.

Tanah Sultan

Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro, menjelaskan, mediasi masih alot karena warga bersikukuh meminta tenggat waktu untuk mencari hunian baru. Sedangkan, menurutnya, warga sebenarnya sudah mengetahui rencana penertiban ini sejak 2021. Tetapi, tiga tahun kemudian, masyarakat menurut Krisbiyantoro semestinya tidak mengklaim waktunya kurang.

"Warga menuntut ditunda (penertiban) dan mengakui dari segi status atau hukum mereka mengakui ada keperpihakan segi hukum di kami (masalah status tanah)," jelas Krisbiyantoro sesuai mediasi.

Perlu diketahui, kawasan Bongsuwung merupakan tanah Sultan Ground (SG) yang dikelola PT KAI. Krisbiyantoro mengklaim pihaknya juga telah mengantongi serah *palilah* dari pihak Keraton Yogya. "Luasannya kanan kiri (perlintasan KA), kalau di kanan 1.036 meter persegi dan 1.300-an meter persegi," katanya.

Rencana penertiban ini, kata Krisbiyantoro, sudah diketahui oleh Wali Kota Yogyakarta pada saat itu, Haryadi Suyuti. Selain itu, sosialisasi kepada warga juga sudah berulang kali dilakukan. "Kami akan ada surat peringatan yang akan kami layangkan (kepada warga) karena merupakan bagian dari prosedur yang sudah menjadi ketetapan," papar Krisbi. (nda)



TEMUI LEGISLATOR - Beberapa perwakilan warga Bongsuwung Yogyakarta menggelar audiensi di DPRD DIY, Rabu (4/9).

TRIBUN JOGJA/MEFTABUL HUDA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005